

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan NIB ini sudah dilakukan dengan tata cara dan pengelolaan yang cukup baik. Dengan adanya peraturan dari Lembaga OSS, sehingga pemerintah kecamatan dapat dikatakan sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP. Pengelolaan pelayanan di kecamatan Tiris sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan adanya website dan sosialisasi tata kelola yang ada di kantor pemerintahan Kecamatan Tiris bisa dibilang cukup baik. Pengelolaan tanggung jawab kecamatan sudah cukup baik, dimana pemerintah sudah menetapkan peraturan tugas, fungsi dan wewenang yang harus dipenuhi oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. dengan adanya undang - undang ini kecamatan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Ini merupakan salah satu relevansi dengan prinsip akuntabilitas.

Pengelolaan kantor pelayanan NIB di kecamatan Tiris sudah cukup baik, pemerintah kecamatan Tiris memberi akses masyarakat dalam memudahkan pembuatan NIB melalui webiste resmi, mekanisme pengelolaan pelayanan dikecamatan Tiris sudah tersistematis dengan adanya sosialisasi secara langsung dan digitalisasi, hal in dapat di katakan bahwa Pemerintah Kantor Kecamatan Tiris mengimpementasikan prinsip Transparansi

Pengelolaan hukum dan aturan kepada masyarakat merupakan tugas bagi pelayan public untuk mematuhi peraturan yang ada sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah atau dalam hal ini pihak Kecamatan di Tiris menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi rakyat atau peserta untuk memberikan suatu masukan, tanggapan kritik dan saran serta pendapatnya mereka sendiri terhadap instansi-instansi yang dinilainya transparan.

Pemerintah Kecamatan Tiris mungkin bisa meningkatkan lagi perihal sosialisasi regulasi tentang pelayanan NIB karena masih banyak orang yang tidak mengerti tentang perundang-undangan. Hal seperti ini menjadi hal yang harus benar benar diperhatikan oleh seorang *public service*. Untuk itu pelayanan publik harus mengaplikasikan prinsip – prinsip *good governance* agar mencapai pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang di capai oleh pemerintah Kecamatan Tiris

B. Saran

Adapun saran dari penelitian berikutnya adalah :

1. Analisis Perbandingan Best Practices: Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk melakukan analisis perbandingan terhadap praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan daerah di berbagai daerah. Hal ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam

penerapan prinsip good governance serta mengeksplorasi strategi terbaik untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

2. Studi Kasus Implementasi Good Governance: Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melakukan studi kasus mendalam pada daerah-daerah yang berhasil menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan mereka. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan *good governance* di daerah lain.

3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Good Governance: Penelitian berikutnya dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas kebijakan- kebijakan yang telah diterapkan untuk mendorong good governance di tingkat pemerintahan daerah. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran kinerja, dampak kebijakan, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip good governance. Hasil evaluasi ini dapat memberikan masukan penting dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang ada.

4. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder: Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Fokus penelitian ini dapat mencakup identifikasi hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi publik serta pengembangan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat.

5. Penyusunan Pedoman dan Panduan Praktis: Penelitian berikutnya dapat berfokus pada penyusunan pedoman dan panduan praktis untuk menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan daerah. Panduan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kebijakan dan praktik yang mendukung good governance.